



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Tahun 2023 ini mengacu pada Renstra Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2023, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan telah tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, September 2023

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



Premi Lasari

NIP. 197402241993112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 4

1.3.1. Maksud..... 4

1.3.2. Tujuan..... 4

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan..... 4

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023 6

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 6

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan..... 33

2.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah 33

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran..... 34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 35

BAB IV PENUTUP 42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis Tahun 2023 - 2026 yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan pada dasarnya hanya akan berhasil jika pembangunan daerah sebagai sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya. Untuk itu, sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah, dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, sumber daya maupun kemampuan yang berbeda untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-P) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023. Selanjutnya, Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 memuat Program/ kegiatan Tahun 2023, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perubahan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 telah melalui proses penyusunan dan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya yaitu pembahasan internal Dinas Sosial serta jajaran khususnya UKPD yang berkepentingan dalam Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023, hal ini guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan pada sisa Tahun 2023 melalui pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun

2023 ini berpedoman Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 dan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 346 dan Pasal 360).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum atau Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Peyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangu-nan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 104);
20. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor

- 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 201);
 26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;
 28. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; dan
 29. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu meliputi urusan sosial untuk tahun rencana 2023 serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk dimasukkan dalam dokumen KUA-PPAS Tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 adalah untuk :

- a. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024;
- b. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
- c. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- d. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka Perangkat Daerah (PD) Dinas

Sosial Provinsi DKI Jakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa sistematika dokumen Perubahan RKPD adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan dan sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Realisasi program/kegiatan dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2023, faktor-faktor penyebab pencapaian target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Bab ini berisi rencana kerja dan rencana pendanaan, yaitu Program Pembangunan Daerah (Program Strategis Daerah) dan Program Perangkat Daerah untuk mewujudkan target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menggunakan lima (5) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Penanganan Bencana dengan jumlah pagu anggaran DPA sebesar Rp1.695.209.219.306,- dan realisasi sebesar Rp448.892.343.793,- atau 26,48%

Berikut sajian capaian kinerja program dan persentase serapan anggaran yang tercantum dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
Per 30 Juni 2023

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
DINAS SOSIAL			1.272.579.477.405	274.926.780.280	21,60 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		5.484.073.330	918.388.890	16,75 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	5.383.655.630	918.388.890	17,06 %
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.417.700	-	0,00 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		14.706.801.104	4.063.111.398	27,63 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	3.005.074.403	691.105.198	23,00 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	11.701.726.701	3.372.006.200	28,82 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		256.587.358.627	130.277.451.197	50,77 %
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	272.816.844	88.400.000	32,40 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.910.964	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	246.903.044.976	126.818.185.184	51,36 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.515.165.336	1.025.578.471	40,78 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.748.183.966	296.289.613	16,95 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.860.831	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.253.875.710	1.876.493.167	44,11 %
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	527.500.000	172.504.762	32,70 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		954.872.825.273	138.838.235.767	14,54 %
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	141.600.000	47.200.000	33,33 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	954.731.225.273	138.791.035.767	14,54 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		40.928.419.071	829.593.028	2,03 %
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.089.671.635	-	0,00 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	15.025.292.809	-	0,00 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan	494.425.546	-	0,00 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pengemis di dalam Panti			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	18.714.987.534	-	0,00 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.604.041.547	829.593.028	14,80 %
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA			7.912.655.116	3.559.490.422	44,98 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.068.520.326	947.847.900	45,82 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.726.884	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.799.326	114.208.424	88,67 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.363.884	25.104.163	47,94 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.475.375	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.810.554.857	804.935.313	44,46 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.844.134.790	2.611.642.522	44,69 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.844.134.790	2.611.642.522	44,69 %
			7.531.462.255	3.321.339.250	44,10 %
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.232.579.538	613.550.962	27,48 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99.413.820	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.800.000	4.800.000	100,00 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	453.391.050	208.261.990	45,93 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.504.293	13.333.500	7,43 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.415.105	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	927.055.270	387.155.472	41,76 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.298.882.717	2.707.788.288	51,10 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.298.882.717	2.707.788.288	51,10 %
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2			7.251.431.556	3.380.219.297	46,61 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.748.799.578	763.035.244	43,63 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.858.068	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.651.038	103.603.173	70,65 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.940.689	14.152.500	14,45 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.346.145	17.696.200	15,61 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.003.638	619.583.371	47,33 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.502.631.978	2.617.184.053	47,56 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.502.631.978	2.617.184.053	47,56 %
			8.147.795.563	3.315.908.236	40,70 %
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.592.270.443	981.307.123	37,86 %
		Administrasi Kepegawaian	114.882.669	-	0,00 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		n Perangkat Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.000.000	9.992.900	99,93 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.872.752	250.132.676	72,95 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.176.549	7.448.100	4,80 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.974.983	2.719.500	0,85 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.649.363.490	711.013.947	43,11 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.555.525.120	2.334.601.113	42,02 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.555.525.120	2.334.601.113	42,02 %
			10.581.709.281	3.980.854.886	37,62 %
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.226.245.844	1.008.355.499	45,29 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.314.595	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	532.252.266	435.177.761	81,76 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.242.737	8.267.114	5,36 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.721.598	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.295.714.648	557.910.624	43,06 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.355.463.437	2.972.499.387	35,58 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	8.355.463.437	2.972.499.387	35,58 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Terlantar di dalam Panti			
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2			17.483.275.012	6.221.767.782	35,59 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.906.769.533	1.142.478.075	29,24 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.632.716	106.220.340	99,61 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.540.000	5.000.000	32,18 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	677.431.745	99.069.786	14,62 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.198.310	21.286.470	4,76 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.651.706	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.282.315.056	910.901.479	39,91 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		13.576.505.479	5.079.289.707	37,41 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	13.576.505.479	5.079.289.707	37,41 %
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH			11.736.272.090	4.653.899.381	39,65 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.755.161.156	834.615.256	30,29 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	104.443.230	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.989.965	231.591.945	68,12 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.436.511	29.365.994	10,98 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	857.173.680	44.692.000	5,21 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.181.117.770	523.965.317	44,36 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.981.110.934	3.819.284.125	42,53 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	8.981.110.934	3.819.284.125	42,53 %
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1			19.033.423.408	9.326.741.728	49,00 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		4.605.131.754	1.468.932.479	31,90 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.656.806	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.000.000	14.990.000	99,93 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.065.289	264.240.485	60,88 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	432.498.270	-	0,00 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.020.307.049	70.754.850	6,93 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.610.604.340	1.118.947.144	42,86 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		14.428.291.654	7.857.809.249	54,46 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	14.428.291.654	7.857.809.249	54,46 %
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2			17.934.075.890	9.321.011.234	51,97 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		3.898.346.484	2.051.676.115	52,63 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.735.921	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.600.000	6.600.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	567.071.054	505.747.884	89,19 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	631.833.603	458.159.610	72,51 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	366.822.725	157.106.600	42,83 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.205.283.181	924.062.021	41,90 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		14.035.729.406	7.269.335.119	51,79 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	14.035.729.406	7.269.335.119	51,79 %
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA			6.076.010.970	2.614.220.912	43,03 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.341.295.296	503.466.308	37,54 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.446.446	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.161.515	155.257.110	82,08 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.843.978	-	0,00 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.844.057	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.999.300	343.209.198	43,67 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		4.734.715.674	2.110.754.604	44,58 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	4.734.715.674	2.110.754.604	44,58 %
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1			19.841.885.754	8.267.192.070	41,67 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.339.229.629	937.164.934	40,06 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.781.454	-	0,00 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.083.149	562.836.755	84,37 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.856.072	28.416.000	11,56 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.765.357	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	986.743.597	325.912.179	33,03 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		17.502.656.125	7.330.027.136	41,88 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	17.502.656.125	7.330.027.136	41,88 %
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2			24.366.263.837	9.815.935.509	40,28 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.655.899.711	813.958.117	30,65 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	121.310.013	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.900.000	3.900.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.926.285	38.094.300	6,60 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.092.376	45.707.075	18,20 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.209.897	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.597.461.140	726.256.742	45,46 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		21.710.364.126	9.001.977.392	41,46 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	21.710.364.126	9.001.977.392	41,46 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Terlantar di dalam Panti			
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3			12.713.019.061	6.104.904.154	48,02 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.464.822.950	641.741.217	43,81 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.962.988	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.000.000	12.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	359.875.888	312.096.806	86,72 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.121.629	16.364.257	16,02 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296.608.685	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	645.253.760	301.280.154	46,69 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		11.248.196.111	5.463.162.937	48,57 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	11.248.196.111	5.463.162.937	48,57 %
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4			9.789.364.985	4.786.817.906	48,90 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.428.509.112	1.125.877.576	46,36 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103.730.734	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	379.948.769	345.719.609	90,99 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.168.967	13.799.310	15,30 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	706.015.770	239.800.000	33,97 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Urusan Pemerintah Daerah			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.143.644.872	521.558.657	45,60 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		7.360.855.873	3.660.940.330	49,74 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	7.360.855.873	3.660.940.330	49,74 %
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN			5.859.767.680	2.554.306.084	43,59 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.516.865.158	615.412.547	40,57 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.969.415	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	118.637.474	64.437.695	54,31 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.137.440	22.017.500	35,43 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.465.809	10.323.000	14,65 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.223.655.020	514.634.352	42,06 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		4.342.902.522	1.938.893.537	44,65 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	4.342.902.522	1.938.893.537	44,65 %
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1			6.221.536.998	2.745.456.290	44,13 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.907.096.535	681.848.533	35,75 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.351.590	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.992.082	235.877.700	88,35 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.265.088	1.243.134	0,96 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.159.785	31.770.000	57,60 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.327.990	406.957.699	29,25 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		4.314.440.463	2.063.607.757	47,83 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.314.440.463	2.063.607.757	47,83 %
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2			6.425.435.636	2.858.697.752	44,49 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.497.145.246	602.778.966	40,26 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.987.996	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.264.000	-	0,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.485.032	144.588.005	65,88 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.817.662	-	0,00 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.628.306	7.314.900	6,01 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.051.962.250	450.876.061	42,86 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		4.928.290.390	2.255.918.786	45,77 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.928.290.390	2.255.918.786	45,77 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA			15.444.068.105	6.244.763.461	40,43 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		4.146.933.076	1.377.264.145	33,21 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.937.425	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.000.000	16.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	754.391.201	470.281.870	62,34 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.516.940	5.155.500	4,35 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.142.149.818	49.429.000	4,33 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.055.937.692	836.397.775	40,68 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		11.297.135.029	4.867.499.316	43,09 %
		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	11.297.135.029	4.867.499.316	43,09 %
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1			7.955.156.882	3.350.149.340	42,11 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.293.747.812	525.950.608	40,65 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.526.760	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.277.056	3.000.000	91,55 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.646.076	39.096.300	33,81 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.587.387	666.000	1,37 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.409.133	12.789.195	95,38 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1.066.301.400	470.399.113	44,12 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		6.661.409.070	2.824.198.732	42,40 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	6.661.409.070	2.824.198.732	42,40 %
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2			13.947.711.766	5.303.614.166	38,02 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.694.672.044	928.668.965	34,46 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154.560.751	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.850.007	204.589.544	49,32 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	186.841.472	-	0,00 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.093.034	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	1.627.326.780	719.079.421	44,19 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		11.253.039.722	4.374.945.201	38,88 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	11.253.039.722	4.374.945.201	38,88 %
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3			11.898.920.365	5.308.888.049	44,62 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.012.047.099	849.911.276	42,24 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.327.470	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.210.000	2.210.000	100,00 %
		Administrasi Umum	259.332.909	145.661.990	56,17 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Perangkat Daerah			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.761.223	65.559.397	42,64 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.578.851	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.390.836.646	636.479.889	45,76 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		9.886.873.266	4.458.976.773	45,10 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	9.886.873.266	4.458.976.773	45,10 %
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4			9.677.094.006	4.639.457.678	47,94 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.506.881.690	629.989.787	41,81 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.300.320	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.270.000	3.270.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.559.595	99.122.753	86,53 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.468.340	1.221.000	2,52 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.050.855	12.870.000	9,19 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.154.232.580	513.506.034	44,49 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.170.212.316	4.009.467.891	49,07 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	8.170.212.316	4.009.467.891	49,07 %
PUSAT DATA DAN INFORMASI			53.749.285.100	23.985.259.360	44,62 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
KESEJAHTERAAN SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.608.279.929	704.779.658	27,02 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.030.665.655	675.281.850	33,25 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.785.315	4.126.758	5,05 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.738.439	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.090.520	23.371.050	41,67 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		51.141.005.171	23.280.479.702	45,52 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	51.141.005.171	23.280.479.702	45,52 %
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI			9.132.852.972	3.227.170.815	35,34 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		9.132.852.972	3.227.170.815	35,34 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.298.746	66.039.450	99,61 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.500.000	3.500.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.485.165	199.728.440	98,64 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.259.880.167	271.383.573	8,32 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.520.604	225.830.400	53,83 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.181.168.290	2.460.688.952	47,49 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT			21.084.186.608	6.259.927.171	29,69 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		3.629.142.800	775.500.000	21,37 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.629.142.800	775.500.000	21,37 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		5.468.573.009	1.434.909.455	26,24 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	956.881.110	432.077.685	45,15 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.511.691.899	1.002.831.770	22,23 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.004.304.003	749.092.797	14,97 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.765.423	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.000.000	7.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.198.663	97.936.400	25,29 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.177.622.308	388.925.177	9,31 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.076.219	204.000.000	99,48 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.641.390	51.231.220	43,92 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		6.982.166.796	3.300.424.919	47,27 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6.982.166.796	3.300.424.919	47,27 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT			14.618.358.103	5.211.781.573	35,65 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		2.367.572.800	1.171.190.000	49,47 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.367.572.800	1.171.190.000	49,47 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		3.125.828.504	566.043.420	18,11 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	765.504.888	342.100.920	44,69 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.360.323.616	223.942.500	9,49 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1.887.210.662	298.363.719	15,81 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	249.110.806	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	217.511.496	121.554.870	55,88 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	643.390.768	73.138.600	11,37 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.752.632	29.878.430	5,04 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.944.960	71.291.819	39,18 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		210.852.940	-	0,00 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	210.852.940	-	0,00 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		7.026.893.197	3.176.184.434	45,20 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,	7.026.893.197	3.176.184.434	45,20 %

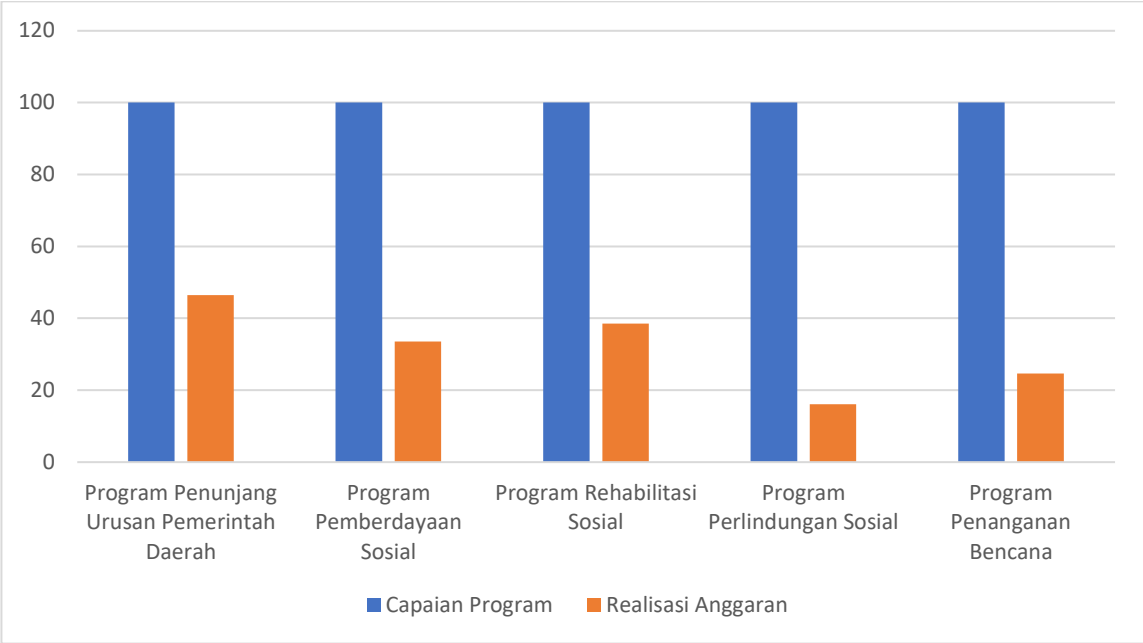
PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN			18.034.717.333	7.031.021.839	38,99 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		3.837.817.276	1.590.000.000	41,43 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	3.837.817.276	1.590.000.000	41,43 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		3.836.398.318	713.419.825	18,60 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	956.881.110	431.093.610	45,05 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2.879.517.208	282.326.215	9,80 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.046.887.168	808.698.120	39,51 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	355.267.766	346.992.000	97,67 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.697.200	4.112.900	87,56 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	541.182.056	303.687.948	56,12 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	879.273.235	127.588.198	14,51 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.759.178	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.707.733	26.317.074	28,39 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		8.313.614.571	3.918.903.894	47,14 %
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	8.313.614.571	3.918.903.894	47,14 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR			20.616.263.365	6.833.268.427	33,15 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		4.528.246.393	1.858.500.000	41,04 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	4.528.246.393	1.858.500.000	41,04 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		5.312.081.019	596.038.969	11,22 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	765.504.888	349.487.898	45,65 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	4.546.576.131	246.551.071	5,42 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.748.678.084	1.028.575.891	37,42 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.728.268	-	0,00 %
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.479.156	176.855.380	57,89 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.317.470	447.292.148	68,78 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.498.856	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	939.654.334	399.428.363	42,51 %
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		159.896.713	-	0,00 %
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	159.896.713	-	0,00 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		7.867.361.156	3.350.153.567	42,58 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	7.867.361.156	3.350.153.567	42,58 %
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA			12.877.211.236	5.016.604.472	38,96 %
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		2.209.507.386	1.080.000.000	48,88 %
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	2.209.507.386	1.080.000.000	48,88 %
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		2.591.774.783	1.253.566.488	48,37 %
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	765.504.888	346.044.630	45,20 %
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.826.269.895	907.521.858	49,69 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2.701.454.345	430.070.605	15,92 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.454.882	-	0,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	328.179.994	194.541.679	59,28 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.734.353.339	162.553.368	9,37 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.862.810	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	204.603.320	72.975.558	35,67 %
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.374.474.722	2.252.967.379	41,92 %

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.374.474.722	2.252.967.379	41,92 %
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA			14.688.530.968	4.724.894.269	32,17 %
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14.688.530.968	4.724.894.269	32,17 %
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.181.125	-	0,00 %
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.839.725	73.385.466	17,61 %
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.124.770.744	-	0,00 %
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.024.133	-	0,00 %
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.934.715.241	4.651.508.803	46,82 %
TOTAL			1.695.209.219.306	448.892.343.793	26,48 %

Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Dan Serapan Anggaran



Sumber : e Monev dan e SAKIP Tahun 2023/Triwulan II

Analisis capaian kinerja program dan serapan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya pada Triwulan II Tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota, 22 Panti Sosial, UPK PPPIJ, Sekretariat Masjid KH. Hasyim Ashari dan Pusdatin Kesos dengan capaian kinerja program sebesar 100% dan realisasi anggaran hingga Triwulan II adalah sebesar Rp162.294.928.703,- atau lebih rendah 53,66% dari target tahunan yaitu Rp350.244.526.772,- maka realisasi Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi adalah 46,34% dari target 100%. Sedangkan untuk capaian kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah yang dicapai sampai dengan triwulan II adalah 100% dari dua (2) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian;
2. Program Pemberdayaan Sosial merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas 5 Wilayah Kota. Realisasi anggaran hingga Triwulan II adalah Rp7.393.578.890,- lebih rendah 66,48% dari target tahunan yaitu Rp22.056.359.985,- maka realisasi Program Pemberdayaan Sosial adalah 33,52% dari target 100%. Pada Program Pemberdayaan Sosial capaian kinerja pada Triwulan II mencapai 36,6% dari target pada akhir tahun sebesar 79,5% dengan indikator Persentase Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Mampu Melakukan Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial 5 Wilayah Kota dan 22 UPT Panti Sosial. Realisasi anggaran Program Rehabilitasi

Sosial hingga Triwulan II adalah sebesar Rp108.458.031.176,- atau lebih rendah 61,47% dari tahunan yaitu Rp281.482.295.715,- maka realisasi Program Rehabilitasi Sosial adalah 38,53% dari target 100%; Pada Program Rehabilitasi Sosial capaian kinerja pada Triwulan II mencapai 99,91% dari target sebesar 100% di setiap Triwulan dengan indikator Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial;

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial, Bidang PKS dan PFM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan UPT Pusdatinjamsos. Realisasi anggaran hingga Triwulan II adalah sebesar Rp162.118.715.469,- atau 83,89% dari target tahunan yaitu Rp1.006.384.580.097,- maka realisasi Program Perlindungan dan Sosial adalah 16,11% dari target 100%. Pada Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial capaian kinerja pada Triwulan II mencapai 99,7% dari target sebesar 100% di setiap Triwulan dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penerima Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Tepat Sasaran;
5. Program Penanganan Bencana merupakan program Dinas Sosial yang dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Sosial 5 Wilayah. Realisasi anggaran untuk Program Penanganan Bencana hingga Triwulan II adalah sebesar Rp8.627.089.555,- atau lebih rendah 75,38% dari target tahunan yaitu Rp35.041.456.737,- maka realisasi Program Penanganan Bencana adalah 24,62% dari target 100%. Pada Program Penanganan Bencana capaian kinerja pada Triwulan II mencapai 99,75% dari target sebesar 100% di setiap Triwulan dengan indikator Indeks Pencapaian SPM Penanganan Bencana.

Data Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RATA-RATA
1	2	3
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	98.26%
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%
1.06.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	n/a%
1.06.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	n/a%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
1.06.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	n/a%
1.06.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	n/a%
1.06.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	100%
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	n/a%
1.06.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
1.06.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.58%
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.16%
1.06.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	n/a%
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RATA-RATA
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a%
1.06.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	n/a%
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	100%
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	100%
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	100%
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	100%
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	100%
1.06.02.1.02.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	100%
1.06.02.1.02.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	100%
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	73.46%
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	n/a%
1.06.04.1.01.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	n/a%
1.06.04.1.01.12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	n/a%
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	n/a%
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	n/a%
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	n/a%
1.06.04.1.04.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	n/a%
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	n/a%
1.06.04.1.05.03	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	n/a%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	73.46%
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	100%
1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	n/a%
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	46.92%
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	74.21%
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100%
1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	100%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RATA-RATA
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	48.42%
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	44.97%
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	51.86%
1.06.06	Program Penanganan Bencana	100%
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	n/a%
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	n/a%
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	n/a%
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	n/a%
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	n/a%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	100%
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	100%

Realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi untuk target kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 100% dapat dicapai dengan hasil penilaian rata-rata kinerja Program sebesar 98.26%. Adapun indikator kegiatan penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang seharusnya dapat dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan karena belum terbitnya SPD kegiatan tersebut;
2. Pada Program Pemberdayaan Sosial untuk rata-rata kinerja di Triwulan II telah dapat mencapai target nilai rata-rata kinerja Program sebesar 100%;
3. Pada Program Rehabilitasi Sosial untuk target kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 100% dapat dicapai dengan hasil penilaian rata-rata kinerja Program sebesar 73.46%. Belum maksimal ketercapaian dikarenakan penetapan target kegiatan pada Triwulan IV sehingga capaian yang sudah didapat pada Triwulan II belum dapat diperhitungkan (n/a%);
4. Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk rata-rata kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 74.21% dapat dicapai. Adapun tingkat ketercapaian pada program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dipengaruhi belum tersalurkannya Bantuan Sosial berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang baru terlaksana penyalurannya Triwulan II (periode I);
5. Pada Program Penanganan Bencana untuk target kinerja Triwulan II Tahun 2023 adalah sebesar 100% dapat dicapai dengan hasil penilaian rata-rata kinerja Program sebesar 100%.

2.2. Faktor-faktor Penyebab Pencapaian Target Kinerja Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan Kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target Kinerja Program/Kegiatan, antara lain:

1. Belum terbitnya SPD kegiatan yang sudah direncanakan pada Triwulan II Tahun 2023;
2. Belum terbitnya Surat Ketetapan Pj. Gubernur atas Daftar Penerima Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2023 terbaru;
3. Penetapan target kegiatan yang ditetapkan pada Triwulan IV, sehingga ketercapaian pada Triwulan II Tahun 2023 dinilai sebagai n/a.

2.3. Implikasi Yang Timbul Terhadap Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran Triwulan II, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masuk dalam kategori baik, akan tetapi untuk penyerapan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masih rendah mencapai 26,48% hal ini disebabkan oleh beberapa SPD kegiatan yang diajukan untuk pencairan realisasi tidak dapat terbit sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana dan untuk kegiatan lain masih menunggu terbitnya Dasar dan Ketetapan dari Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan. Oleh

karena itu, Implikasi yang timbul terhadap capaian program renstra Perangkat Daerah tercapainya target kinerja pada Triwulan II dan terus melakukan perbaikan untuk dapat melewati target capaian Triwulan III.

2.4. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran

Arah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi faktor-faktor penyebab hasil capaian target kinerja program/kegiatan adalah :

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas, kondisi tersebut sangat erat dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang membantu Pj. Gubernur dalam Urusan Wajib bidang Sosial. Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dimana cakupan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta telah mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi bidang sosial yang disyaratkan.

Target capaian kinerja kegiatan yang sudah direncanakan pada Triwulan II beberapa dapat dilaksanakan dan terkait belum terbitnya SPD kegiatan pada Triwulan II diharapkan dapat diantisipasi pelaksanaan pada Triwulan III untuk percepatan. Target pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dapat dimaksimalkan pada Triwulan II akan tetapi belum dapat terealisasi sehingga perlu selayaknya menjadi perhatian serta evaluasi dengan menyesuaikan Rencana Kerja Tahun 2023.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta juga melakukan koordinasi bersama dengan pihak lain (Program CSR) dalam mendukung serta meningkatkan dalam beberapa kegiatan, antara lain penyediaan alat bantu fisik bagi penyandang disabilitas serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi Warga Binaan Sosial pada Panti Sosial dibawah nauangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan pelaksanaan dan koordinasi bersama tersebut membantu baik bagi Dinas Sosial maupun Perusahaan selaku penunjang utama dalam program CSR.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan sesuai dengan kondisi dan dinamika saat ini dengan memperhatikan hasil evaluasi, usulan, saran, masukan dan pertimbangan baik Dinas Sosial maupun Pemangku kepentingan, dengan harapan rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja Dinas Sosial dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola, pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja ini memuat informasi tentang target kinerja sasaran, target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan dengan membandingkan target indikator kinerja dan anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan sebelumnya pada Tahun 2023. Adapun rencana program dan kegiatan pada perubahan rencana kerja dinas sosial sebagai berikut:

- 1. Penyesuaian pagu anggaran yang berkurang dan bertambah serta target indikator sasaran, program/kegiatan dan sub kegiatan karena dinamika saat ini;
- 2. Penambahan belanja untuk penanganan hasil penjangkauan PMKS dalam rangka acara dukungan penyelenggaraan KTT ASEAN di Jakarta;
- 3. Penyesuaian Besaran UMP 2023 menjadi 4.901.798 dan Penghapusan komponen Tunjangan Asuransi Kesehatan PJLP;
- 4. Penyesuaian Belanja pada Pelaksanaan Dapur Umum untuk Program Penanganan Bencana di Provinsi DKI Jakarta.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri dari program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai dengan pagu Perubahan Rencana Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 – 2026 dalam rangka mencapai sasaran Dinas Sosial Tahun 2023 terdapat dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
DINAS SOSIAL		1.310.048.377.489	1.272.579.477.405	1.267.698.576.610
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	6.669.896.390	5.484.073.330	5.241.827.990
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	13.820.371.567	14.706.801.104	14.778.420.368
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	296.170.189.600	256.587.358.627	253.909.430.663

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
	N DAERAH PROVINSI			
	PROGRAM PERLINDUNGA N DAN JAMINAN SOSIAL	950.908.025.273	954.872.825.273	953.881.002.229
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	42.479.894.659	40.928.419.071	39.887.895.360
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK BALITA TUNAS BANGSA		7.912.753.125	7.912.655.116	8.000.279.400
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	2.072.406.802	2.068.520.326	2.160.342.606
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.840.346.323	5.844.134.790	5.839.936.794
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1		10.386.574.504	7.531.462.255	6.902.309.406
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	2.776.479.909	2.232.579.538	1.469.800.912
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.610.094.595	5.298.882.717	5.432.508.494
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2		5.248.286.667	7.251.431.556	7.282.191.158
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	1.724.952.923	1.748.799.578	1.796.639.705
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.523.333.744	5.502.631.978	5.485.551.453
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3		8.906.709.143	8.147.795.563	7.913.629.422
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	2.567.343.453	2.592.270.443	2.341.611.783
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.339.365.690	5.555.525.120	5.572.017.639
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 4		7.298.750.648	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	2.336.890.337	-	-
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.961.860.311	-	-
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI		10.581.741.546	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI	2.191.129.436	-	-
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	8.390.612.110	-	-
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1		-	10.581.709.281	9.641.651.502

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	2.226.245.844	2.107.349.669
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	8.355.463.437	7.534.301.833
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2		-	17.483.275.012	18.542.666.737
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	3.906.769.533	3.651.480.356
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	13.576.505.479	14.891.186.381
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAN KASIH		11.741.150.565	11.736.272.090	10.635.974.701
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.692.352.273	2.755.161.156	2.475.166.801
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.048.798.292	8.981.110.934	8.160.807.900
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1		19.033.658.119	19.033.423.408	21.616.516.556
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.818.559.010	4.605.131.754	4.163.609.526
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.215.099.109	14.428.291.654	17.452.907.030
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2		17.935.084.068	17.934.075.890	20.120.666.701
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.764.502.517	3.898.346.484	3.586.094.934
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	14.170.581.551	14.035.729.406	16.534.571.767
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA		9.962.629.843	6.076.010.970	5.854.225.577
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.388.423.925	1.341.295.296	1.169.539.742
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.574.205.918	4.734.715.674	4.684.685.835
PANTI SOSIAL BINA KARYA WANITA HARAPAN MULIA		5.475.619.535	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.558.393.915	-	-
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.917.225.620	-	-
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1		22.036.792.559	19.841.885.754	20.548.937.561
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.909.083.066	2.339.229.629	2.365.702.301

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
	N DAERAH PROVINSI			
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	20.127.709.493	17.502.656.125	18.183.235.260
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2		27.405.702.241	24.366.263.837	26.582.516.178
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.699.062.927	2.655.899.711	2.505.788.864
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	24.706.639.314	21.710.364.126	24.076.727.314
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3		12.864.558.860	12.713.019.061	13.468.743.586
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.504.437.801	1.464.822.950	1.382.743.988
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.360.121.059	11.248.196.111	12.085.999.598
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4		-	9.789.364.985	10.151.727.114
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	2.428.509.112	2.469.258.341
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	7.360.855.873	7.682.468.773
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN		6.119.714.885	5.859.767.680	5.834.085.394
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.536.819.916	1.516.865.158	1.502.005.278
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.582.894.969	4.342.902.522	4.332.080.116
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 1		6.221.982.084	6.221.536.998	5.705.797.097
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.686.639.293	1.907.096.535	1.343.610.397
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.535.342.791	4.314.440.463	4.362.186.700
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2		6.425.612.237	6.425.435.636	6.408.584.179
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.514.736.353	1.497.145.246	1.414.642.651
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.910.875.884	4.928.290.390	4.993.941.528
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BHAKTI KASIH		9.978.470.236	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.006.156.124	-	-

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.972.314.112	-	-
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA		-	15.444.068.105	14.210.676.452
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	4.146.933.076	3.320.035.945
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	11.297.135.029	10.890.640.507
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1		16.601.431.414	7.955.156.882	7.931.168.010
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.675.431.131	1.293.747.812	1.329.037.172
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	13.926.000.283	6.661.409.070	6.602.130.838
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2		13.948.359.311	13.947.711.766	13.875.125.156
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.733.529.712	2.694.672.044	2.487.509.718
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.214.829.599	11.253.039.722	11.387.615.438
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3		11.899.166.962	11.898.920.365	11.997.763.094
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.991.228.867	2.012.047.099	1.963.161.996
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.907.938.095	9.886.873.266	10.034.601.098
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4		12.297.977.117	9.677.094.006	9.616.037.878
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.832.145.045	1.506.881.690	1.418.317.131
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	10.465.832.072	8.170.212.316	8.197.720.747
PUSAT DATA DAN INFORMASI JAMINAN SOSIAL		53.749.300.024	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.608.294.853	-	-
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	51.141.005.171	-	-
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL		-	53.749.285.100	56.021.777.547
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	2.608.279.929	2.490.476.401

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	51.141.005.171	53.531.301.146
SEKRETARIAT PENGELOLA MASJID RAYA K.H. HASYIM ASY'ARI		7.857.493.233	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.857.493.233	-	-
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI		-	9.132.852.972	9.333.127.417
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	9.132.852.972	9.333.127.417
SEKRETARIAT PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA		12.669.007.564	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.669.007.564	-	-
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA		-	14.688.530.968	11.606.484.299
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	14.688.530.968	11.606.484.299
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT		20.395.577.869	21.084.186.608	20.500.384.741
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.262.304.040	3.629.142.800	3.582.000.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	6.074.314.504	5.468.573.009	4.688.785.950
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.594.832.687	5.004.304.003	5.002.732.843
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.464.126.638	6.982.166.796	7.226.865.948
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT		15.039.147.715	14.618.358.103	13.734.175.905
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.940.712.700	2.367.572.800	2.291.730.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.337.822.571	3.125.828.504	2.428.849.560
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.700.907.159	1.887.210.662	1.525.182.784
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	242.527.525	210.852.940	210.852.940
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.817.177.760	7.026.893.197	7.277.560.621

SKPD	Program	PAGU ANGGARAN		
		INDIKATIF	APBD	APBD P
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN		17.506.002.047	18.034.717.333	17.296.862.924
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.343.450.672	3.837.817.276	3.369.710.488
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.075.714.444	3.836.398.318	3.286.422.326
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.229.613.471	2.046.887.168	2.025.717.803
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.857.223.460	8.313.614.571	8.615.012.307
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR		19.705.400.276	20.616.263.365	18.751.653.230
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.115.108.836	4.528.246.393	4.046.600.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	5.371.730.826	5.312.081.019	3.644.570.789
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.106.131.532	2.748.678.084	2.775.352.896
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	159.896.713	159.896.713	159.896.713
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.952.532.369	7.867.361.156	8.125.232.832
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA		13.681.221.528	12.877.211.236	12.303.307.962
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.284.350.412	2.209.507.386	2.209.507.386
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	4.127.904.049	2.591.774.783	2.774.584.415
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.958.139.686	2.701.454.345	1.981.474.285
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.310.827.381	5.374.474.722	5.337.741.876
Grand Total		1.730.934.253.414	1.695.209.219.306	1.690.087.623.494

Dari hasil rekapitulasi program perubahan Rencana Kerja Dnas Dosial Tahun 2023 ada pengurangan/penurunan pagu indikatif sebesar Rp. 5.121.595.812,- atau 0,3% dari anggaran murni semula Rp. 1.695.209.219.306,- setelah perubahan menjadi Rp. 1.690.087.623.494,-.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan urusan wajib bidang sosial Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2023, Perubahan rencana kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di dalamnya memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi pada keluaran dan hasil yang akan dicapai dengan mempertimbangkan hasil evaluasi renja, permasalahan yang terjadi serta kebutuhan sesuai dengan dinamika saat ini dengan harapan dapat menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang efektif dan efisien.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 akan dijabarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun 2023;
3. Pelaksanaan DPPA Tahun 2023 akan dimonitoring dengan cermat khususnya pada Triwulan III dan IV dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2024.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala beserta pegawai Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2023. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggungjawab Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.